

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan keterbukaan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Joko Widodo melalui deregulasi, kemudahan perizinan, dan insentif pajak berhasil menarik investasi asing, terutama dari Tiongkok. Sebagaimana dianalisis menggunakan Teori Liberalisme Ekonomi, yang dimana kebijakan ini selaras dengan prinsip liberalisme yang mendukung pasar terbuka dan minim intervensi negara, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor asing. Tiongkok memainkan peran besar dalam proyek infrastruktur strategis seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan smelter nikel di Sulawesi, yang didukung oleh insentif dari pemerintah Tiongkok melalui inisiatif Belt and Road Initiative (BRI).

Dengan adanya politik bebas dan aktif yang diterapkan oleh Indonesia, sehingga adanya konsep "social butterfly". Pendekatan ini memungkinkan Jokowi tidak hanya menjaga hubungan ekonomi yang terbuka dengan berbagai negara tetapi juga berperan aktif dalam merangkul Amerika Serikat dan Tiongkok di tengah ketegangan global. Strategi ini mendukung posisi Indonesia sebagai mitra yang seimbang dan fleksibel dalam memanfaatkan peluang kerja sama ekonomi internasional. Pendekatan ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi

negara-negara lain, khususnya Tiongkok, untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan teori liberalisme sebagai dasar, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan keterbukaan Jokowi berhasil menarik investasi Tiongkok serta memperluas peluang ekonomi bagi Indonesia di kancah global. Dengan teori liberalisme sebagai dasar, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan keterbukaan Jokowi berhasil menarik investasi Tiongkok serta memperluas peluang ekonomi bagi Indonesia di kancah global. Namun, tantangan tetap ada terkait ketergantungan berlebih pada investasi Tiongkok dan dampak sosial terhadap tenaga kerja lokal.

4.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun investasi asing, khususnya dari Tiongkok, memberikan dampak positif, pemerintah Indonesia diharapkan dapat melakukan diversifikasi sumber investasi untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu negara. Ketergantungan yang besar pada Tiongkok dapat menimbulkan risiko ekonomi dan politik jika terjadi perubahan kebijakan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investor dari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa.

Selain itu, dengan meningkatnya investasi Tiongkok di sektor infrastruktur dan energi, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan implementasi kebijakan investasi agar manfaatnya optimal. Pemerintah juga harus memperhatikan dampak sosial-politik, menjaga agar investasi tidak mengancam stabilitas ekonomi dan politik domestik. Mengadopsi pendekatan “social butterfly,” dan dengan adanya

Prinsip Politik “bebas dan aktif” Indonesia dapat menjaga hubungan baik dengan berbagai negara tanpa terpengaruh konflik internasional, seperti ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Terakhir, pemerintah harus memastikan bahwa proyek investasi asing berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada infrastruktur ramah lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.